

PENDEKATAN POLITIK DALAM STUDI ISLAM

Dosen Pembimbing: Zaimudin, Dr. M.Ag



Disusun oleh:

Ipah Latifah (11140120000038)

Fauzan Kholidi (11140120000040)

Farah Nurul Afifah (11140120000056)

**PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongannya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Pengantar Studi Islam meskipun dalam penyusunan makalah ini terdapat berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah SWT akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Makalah ini memuat tentang **“Pendekatan Politik Dalam Studi Islam”** yang sangat penting untuk kita bahas dan kita pahami. Walaupun makalah ini mungkin kurang sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terimakasih.

Ciputat, Desember 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Politik Dan Ruang Lingkup Politik.....	3
B. Pendekatan Politik dalam Studi Islam.....	4
C. Pandangan Islam Tentang Politik.....	6
D. Pemikiran Tokoh Tentang Politik Islam.....	11
BAB III PENUTUP.....	15
A. Kesimpulan.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan yang baik antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan yang baik dengan manusia dan dengan alam semesta. Ajaran Islam yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah dalam arti yang formal, khusus dan langsung diatur dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Adapun hubungan manusia dengan manusia dalam arti yang formal, khusus dan langsung diatur dalam ilmu sosial dan ilmu politik. Secara spesifik dalam kajian tersebut, yaitu melalui ilmu politik, manusia selain diperkenalkan tentang cara mendapatkan, mengelola dan mempertahankan kekuasaan, juga diajarkan tentang hukum dan etika politik.

Islam memiliki ajaran yang selain berhubungan dengan kewajiban yang bersifat individual yang disebut fardhu 'ain, juga berhubungan dengan kewajiban kolektif yang disebut fardhu kifayah. Ajaran yang bersifat kolektif ini termasuk ajaran yang berkenaan dengan masalah politik. Dengan ajaran yang bersifat kolektif ini, maka harus di antara anggota masyarakat yang mengurus masalah politik dalam rangka mewujudkan situasi masyarakat yang tertib, aman, damai, harmonis dan sejahtera.

Di dalam Al-Qur'an selain terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin, keharusan pemimpin yang berbuat adil, memutuskan perkara dengan cara musyawarah, melindungi hak-hak asasi manusia, bersikap jujur, amanah, berani menegakkan kebenaran, cerdas, sehat jasmani dan rohani. Ini semua yang harus dipelajari oleh umat Islam.

Saat ini ada keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat dunia untuk mewujudkan keadaan tatanan politik masing-masing negara yang lebih tertib, aman, damai, harmonis, dan sejahtera, yaitu keadaan masyarakat yang terbebas dari permusuhan atau peperangan antara satu bangsa dengan bangsa lain, bebas dari tindakan terorisme, anarkisme dan radikalisme, bebas dari perbudakan dan eksploitasi, bebas dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Untuk mewujudkan

kondisi tersebut, masing-masing agama, melalui pemimpinnya, diwajibkan memberi kontribusinya, termasuk ajaran Islam.¹ Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan dalam studi Islam untuk memahami hal tersebut, agar terciptanya kehidupan manusia yang aman, damai, dan bebas dari hal-hal yang mengancam kehidupan manusia. Dan pendekatan yang cocok untuk permasalahan ini adalah pendekatan politik.

¹ Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, edisi I cet I, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 448.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik Dan Ruang Lingkup Politik

Politik secara etimologi dalam bahasa Arab disebut *Siyasah*, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi siasat. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi untuk ilmu politik.² Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya; dan dapat pula berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan), siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.

Politik biasanya diwakili oleh kata *al Siyasah* dan *Daulah*, walaupun kata-kata tersebut dan kata-kata lainnya yang berkaitan dengan politik seperti keadilan, musyawarah, pada mulanya bukan ditujukan untuk masalah politik. Kata *Siyasah* dijumpai dalam bidang kajian hukum, yaitu ketika berbicara masalah Imamah, sehingga dalam fiqh dikenal adanya bahasan tentang Fiqih *Siyasah*. Demikian pula kata *Daulah* pada mulanya dalam Al-Qur'an digunakan untuk kasus penguasaan harta di kalangan orang kaya, yaitu bahwa dengan zakat diharapkan harta tersebut tidak hanya berputar pada tangan-tangan orang kaya. Karena menurut sifatnya harta tersebut harus bergilir dan berputar, dan tidak hanya dikuasai oleh orang yang kaya (*daulatan baina agniya*), kata *daulah* tersebut juga digunakan untuk masalah politik yang sifatnya berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Demikian juga kata keadilan banyak digunakan dalam memutuskan perkara dalam kehidupan, dan kata musyawarah pada mulanya digunakan pada kasus suami istri yang akan

² Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), cet. I, hlm.57.

menyerahkan anaknya untuk disusui oleh perempuan lain yang dalam hal ini perlu dimusyawarahkan.³

Namun dalam perkembangan selanjutnya sejarah menggunakan kata Siyasa dan kata-kata lain yang maknanya berkaitan dengan kata tersebut digunakan untuk pengertian pengaturan masalah kenegaraan dan pemerintahan serta hal-hal lainnya yang terkait dengannya.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas, sejarah pembentukan negara, di samping menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pendapat umum, peranan partai politik, dan keberadaan pemilihan umum.

Masalah politik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena masalah politik selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera lahir dan batin dan seterusnya tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang diterapkan. Karena demikian pentingnya masalah politik ini, telah banyak studi dan kajian yang dilakukan para ahli terhadapnya.

B. Pendekatan Politik dalam Studi Islam

Pendekatan politik adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi/keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat.

Pendekatan politik dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Pendekatan Politik Dekonfessionalisasi

Secara garis besar, untuk menyatukan perbedaan antara kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara, seluruh identitas keyakinan simbol-simbol kelompok harus bisa ditinggalkan untuk sementara waktu dalam rangka mencapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan politik dekonfessionalisasi adalah pendekatan/usaha dengan meninggalkan seluruh identitas

³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. ke 18, hlm 316–317.

keyakinan yang berupa simbol dalam sementara waktu untuk menyatukan perbedaan antar kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara agar tercapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar.

Pancasila sebagai ideologi digunakan bangsa Indonesia untuk menjadikan bernegara. Dari situ bukan berarti Islam kalah dengan pancasila tetapi di dalam pancasila tersimpan nilai-nilai Islam yaitu keesaan Tuhan, demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.

2. Pendekatan Politik Domestikasi Islam

Teori ini menggambarkan hebatnya Islam berkembang di Indonesia tetapi lumpuh karena didominasi kekuatan lokal. Menurut Harry J. Benda dalam Daniel Dokhada, berpandangan bahwa bangkitnya Mataram Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu Jawa bukanlah Islam itu sendiri.

3. Pendekatan Politik Skismatik Aliran

Teori ini dikembangkan oleh Robert Jay dan Clifford Goerta. Pendekatan skismatik memberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya dan politik serta agama dalam masyarakat Jawa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kekuatan diluar Islam yang senantiasa menyaingi bahkan menjinakkan yaitu kelompok abangan dan priayi.

4. Pendekatan Politik Trikotomi

Pendekatan ini dikembangkan Allan Samson dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak dapat dilihat secara tunggal seperti santri yaitu mereka yang tetap mempertahankan Islam sebagai baris dan norma dalam berpolitiknya. Politik santri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Fundamentalis*, yaitu menetapkan agama dalam aspek kehidupan, termasuk bernegara.
- b. *Reformis*, yaitu menempatkan secara rasional posisi Islam dalam kehidupan politik termasuk membangun relasi bagi penerapan kepentingan Islam.
- c. *Akomodasionis*, yaitu kelompok santri yang lebih terbuka walau sepiantas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari metode gerakan tersebut merupakan langkah terpenting sebagai jalan berfikir/alat negosiasi dalam politik.

5. Pendekatan Politik Kultural/Diversifikasi

Menurut Emmerson, Islam dalam skala kebudayaan memiliki kemenangan yang hebat di Indonesia. Teori ini mengarahkan kembali energi politik umat Islam ke dalam kegiatan non politik. Islam kultural akan memunculkan Islam yang lebih simpatik dan substantif. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kultural menjelaskan islam sebagai kekuatan budaya yang berhasil dalam menaklukkan kekuatan politik.

C. Pandangan Islam Tentang Politik

Di kalangan masyarakat Islam pada umumnya kurang melihat hubungan masalah politik dengan agama. Hal ini antara lain disebabkan karena pemahaman yang kurang utuh terhadap cakupan ajaran Islam itu sendiri. Kuntowijoyo misalnya mengatakan: “Banyak orang, bahkan pemeluk agama Islam itu sendiri, tidak sadar bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi sebuah komunitas (umat) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan dan tujuan-tujuan politik sendiri. Banyak orang beragama Islam, tetapi hanya menganggap Islam adalah agama individual, dan lupa kalau Islam juga merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur, dan mampu melakukan aksi bersama”.⁴ Pernyataan tersebut selanjutnya dijelaskan oleh Kuntowijoyo secara meyakinkan dalam bukunya itu, bahwa Islam memiliki konsep tentang politik.

Saat Nabi Muhammad saw berada di Madinah, beliau tidak hanya mempunyai sifat sebagai Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat sebagai kepala negara. Dan sebagai kepala negara, setelah beliau wafat mesti diganti oleh orang lain untuk memimpin negara yang beliau tinggalkan. Para peneliti sejarah politik ada yang mengategorikan bahwa corak politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw adalah bercorak teo-demokratis, yaitu pola pemerintahan yang dalam menyelesaikan setiap persoalan terlebih dahulu melakukan musyawarah baru kemudian menunggu

⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet I, hlm. 27.

ketetapan dari Tuhan. Hal ini dimungkinkan karena pada masa Nabi Muhammad saw masih dalam proses turunnya wahyu.

Era Rasulullah saw mencerminkan persatuan, usaha, dan pendirian bangunan umat serta menampilkan ruh (spirit) yang mewarnai kehidupan politik. Dan mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru generasi-generasi yang datang kemudian. Namun, pemikiran teoritis saat itu belum dimulai. Hal ini tentu amat logis dengan situasi yang ada, yang belum ada kebutuhan terhadap hal itu. Namun demikian belum lagi era tersebut berakhir, sudah muncul faktor-faktor fundamental yang niscaya mendorong timbulnya pemikiran ini, dan membentuk teori-teori secara lengkap. Di antara faktor-faktor yang terpenting ada tiga hal: *pertama*, sifat sistem sosial yang didirikan oleh Rasulullah saw. *Kedua*, pengakuan akan prinsip kebebasan berfikir untuk segenap individu. *Ketiga*, penyerahan wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem ini, seperti tentang metode manajerialnya, dan penentuan beberapa segi formatnya.

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah saw dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah, jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. Dari nama yang dipilih Nabi saw bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencana Nabi saw dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu identitas politik, yaitu sebuah negara. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem relegius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.

Setelah Rasulullah saw wafat, secara berturut-turut pemerintahan negara dipegang oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Corak pemerintahan yang dipraktikkan oleh para khalifah yang empat ini berbeda dengan yang dipraktikkan di zaman Nabi Muhammad saw. Pada zaman khalifah yang empat ini, bercorak pemerintahan aristokrat demokratik, yaitu sistem pemerintahan yang dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan cara musyawarah yang para anggotanya terdiri dari kalangan aristokrat. Bahkan dalam pemilihan khalifah pun dilakukan secara musyawarah. Namun ironi bahwa

bibit perpecahan umat disebutkan terjadi pada masa Utsman bin Affan dan mencapai puncaknya di zaman khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebab-sebabnya antara lain adalah, pemerintah Utsman bin Affan sudah kurang lurus. Politik nepotisme yang diterapkan di zaman ini menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan kedudukannya.

Selanjutnya setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib tampil menggantikannya. Tetapi segera ia mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah, tertuma Thalhah dan Zubair dari Mekkah yang mendapat dukungan dari Aisyah, tantangan yang datang dari Muawiyah Gubernur Damaskus, dan selanjutnya membawa kepada terjadinya peperangan yang diselesaikan dengan Tahkim (arbitrase) yang secara politik dan diplomatik mengalahkan pihak Ali. Keadaan ini kemudian memicu ketidakpuasan sebagian pengikutnya dan mereka keluar dari barisan Ali dan membentuk aliran Syiah, sedangkan mayoritas lainnya menamakan dirinya sebagai kaum suni. Pengelompokan umat semacam ini terus berlangsung sampai sekarang dan kemudian berpengaruh terhadap corak ajaran agama Islam.⁵

Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang berentetan ini telah menyingkap adanya tiga partai: partai kerajaan monarki, partai Muhakkimah atau Khawarij, dan partai Syiah yang ada di seputar Ali dan anak-anaknya. Dan kontradiksi yang terjadi masing-masing, serta relasi-relasi yang bermacam-macam yang tumbuh di antara mereka, itulah yang berperan bersama dalam sejarah Dinasti Umayyiah, sampai akhir abad pertama hijriyah, minimal.

Adapun pandangan Islam tentang politik dapat dipahami dari ayat-ayat Al Quran dan Hadits berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Q.S. An-Nisa: 59)

⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam...*, op.cit., hlm. 319.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu diatas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaan-Nya dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am: 165)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ
تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu) ?” (Q.S. An-Nisa: 144)

Hadits Nabi Muhammad Saw. berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. (رواه بخاري و مسلم)

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari beberapa ayat tersebut dijumpai berbagai istilah yang berkaitan dengan pemimpin dan ketaatan kepada pemimpin.

Agama Islam menganut politik yang fleksibel, yakni sistem politik yang dapat menerima berbagai bentuk sistem pemerintahan, seperti kerajaan (monarki), kesultanan, republik Islam, parlementer, gabungan antara parlementer dan kerajaan. Saudi Arabia dan Brunei Darussalam menggunakan bentuk monarki atau kerajaan; Pakistan dan Iran, misalnya menggunakan bentuk republik negara Islam; Malaysia menggunakan gabungan antara kerajaan dan parlementer; dan Indonesia menggunakan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, namun memberikan hak dan melindungi pada setiap rakyatnya untuk memeluk, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu)

Dengan demikian, Islam tidak sepenuhnya sejalan dengan pendapat Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, syekh Muhammad Ridha, dan Al-Maududi yang menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani

adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan oleh para Khulafaur Rasyidin.

Islam juga menolak pendirian Ali Abd. Al-Raziq dan Thaha Husein yang mengatakan, bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad saw hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas yang tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan mendirikan atau mengepalai satu negara. Islam tidak sejalan atau bertolak belakang dengan pendapat serupa ini.

Dalam hal pandangan politik, Islam membenarkan pendapat Mohammad Husein Haikal yang berpendirian, bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan ketatanegaraan.⁶

Islam memberi keleluasan terhadap manusia selaku khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia mengemban amanat Allah untuk mengatur dan membuat rasa aman di muka bumi ini. Oleh karena itu supaya tidak terjadi pertumpahan darah dan perusakan di alam dunia ini, maka manusia baik secara individu atau kelompok memilih orang-orang yang terbaik untuk memerintah dan mengatur kondisi masyarakat atau negara, agar tercapai tujuan kedamaian dan keamanan di masyarakat (negara). Islam tidak memberi atau memaparkan bentuk pemerintahan yang khusus, melainkan memberikan prinsip-prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pembentukan negara (politik). Seperti: prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, ketaatan kepada pemimpin, konsultasi dan kebebasan dalam beragama.

D. Pemikiran Tokoh Tentang Politik Islam

1. Al-Farabi

Al-Farabi adalah yang menyiapkan permulaan yang otoritatif untuk terjadinya integrasi antara filsafat Yunani dan berbagai cabangnya di satu pihak dan filsafat Islam di pihak lain. Bagi Al-Farabi, usahanya itu tidak hanya merupakan sebuah

⁶ Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif...*, op.cit., hlm. 455-456.

program ambisius dalam pembaruan politik yang bertujuan membangun kembali fondasi politik sebuah masyarakat religius. Ide-idenya jelas sangat menarik, terlepas dari fakta bahwa dia tidak memiliki pengaruh besar terhadap praktik politik atau pemerintahan pada zamannya. Meski demikian, pengaruhnya terhadap pemikir yang datang setelahnya tidak dapat dibantah.

Al-Farabi memulai dengan pernyataan mengenai pentingnya sebuah asosiasi politik. Pemikiran politiknya berkaitan dengan tujuan utama kehidupan manusia dan metode pencapaian tujuan tersebut. Menurutny, tujuan akhir dari usaha manusia ialah kebahagiaan. Dia percaya bahwa negara adalah alat (instrument) yang tepat untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan sejati itu. Dengan kata lain, manusia membutuhkan asosiasi politik, yaitu dalam bentuk sebuah negara-kota yang dipimpin oleh raja-filosof yang diidentifikasi sebagai pembuat hukum dan imam agar bertahan dan berjuang mewujudkan kesempurnaan. Lebih jauh, manusia tidak bisa menyediakan untuk diri mereka kebutuhan-kebutuhan hidup atau apa saja yang mereka butuhkan dalam rangka mencapai kesempurnaan tanpa bantuan orang lain.

2. Al Mawardi

Al Mawardi cenderung lebih bersifat realistik dan berorientasi pada masalah konstitusi kenegaraan, sementara Al Farabi bersifat idealistik dan mengutamakan pemikiran politiknya tentang kualitas pemimpin (kepala negara). Bagi Al Mawardi, agar terciptanya kerja sama yang baik antar warga masyarakat maka institusi negara menjadi sangat dibutuhkan. Penyelenggaraan pemerintahan (kenegaraan) harus melalui apa yang disebut dengan “kontrak sosial” yakni kooperasi antara kepala negara (eksekutif) dengan kelompok ahlul hal wal aqdi (legislatif). Kepala negara merupakan khalifah kenabian. Beberapa faktor pendukung utama negara adalah: organisasi, penguasa, nilai keadilan, stabilitas, basis ekonomi serta system pembangunan yang berkelanjutan.

3. Al-Ghozali

Pemikiran politik Al Ghozali memiliki khas tersendiri dibanding Al-Farabi maupun Al-Mawardi, dimana Al-Ghozali menekankan soal profesi kerja yakni pertanian, pemintalan (tenun), pembangunan dan politik. Tentang profesi politik merupakan profesi yang terbaik, menurut Al-Ghozali tentunya sesuai dengan kondisi

waktu itu, Ghazali memperkenalkan empat departemen pokok dari profesi politik ini yaitu bidang agraria, hankam, kehakiman dan kejaksaan.

Menurut Al Ghazali, kehidupan dunia ini merupakan ladang akhirat. Maka negara butuh seorang pemimpin yang dapat menjamin terselenggaranya berbagai profesi rakyat (soal lapangan pekerjaan). Bagi Al Ghazali, agama dan negara (penguasa) ibarat fondasi maupun pelindung. Agama dan negara itu menyatu, tidak tersekularistik. Agama dipimpin oleh Nabi, sedangkan negara dipimpin oleh raja. Kedudukannya merupakan manusia pilihan Tuhan.

4. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapat politiknya terutama yang berkaitan dengan teori khilafah. Ia mengatakan bahwa konsep khilafah sebagaimana pemahaman di masa Abbasiyah bukan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits tetapi pemahaman konsep khilafah di masa klasik. Sikap Ibnu Taimiyah lebih cenderung dinilai bahwa pemikiran politiknya lebih dekat dengan kelompok Khawarij. Menurut Ibnu Taimiyah, konsep negara, tidak ada dalam Al Qur'an, yang ada hanya unsur-unsur negara itu sendiri seperti, keadilan, persaudaraan, pertahanan, kedamaian, kepatuhan dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah tidak mengakui adanya konsep negara tunggal seluruh dunia Islam, ini sangat utopis. Dengan demikian, ia tidak mengakui secara implisit istilah negara Islam atau sistem khilafah negara-negara Islam. Baginya yang penting setiap negara tetap sebagai penyelenggara syariah. Konsepsi Islam Ibnu Taimiyah mirip bentuk nomokrasi. Ia menyatakan Islam bukan monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Ibnu Taimiyah tampaknya bergeser dari pemikiran khilafah ke sistem pemerintahan modern yang lebih pragmatis, fungsional, dan rasional. Walaupun demikian, secara tekstual, beliau identik dengan Al Ghazali dalam hal kepala negara, dimana eksistensi kepala negara itu diperlukan bukan saja sekedar menjamin keselamatan jiwa dan harta rakyat maupun telah terpenuhi kebutuhan bidang material tetapi lebih dari itu untuk menjamin berlakunya syariat.

5. Ibnu Khaldun

Dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu "Al Muqaddimah", beliau menulis antara lain bahwa kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan solidaritas rakyat, karena kemenangan terdapat di pihak yang memiliki solidaritas lebih kuat

dan yang para anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati demi kepentingan bersama.

Selanjutnya, Ibnu Khaldun juga menulis bahwa apabila negara sudah berdiri dengan tegak, negara tersebut dapat meninggalkan solidaritas sosial, karena negara yang baru didirikan hanya memiliki kepatuhan rakyat dengan bantuan banyak paksaan dan kekerasan, walaupun rakyat sendiri belum membiasakan diri dengan kekuasaan yang baru dan asing tersebut.

Dalam penjabaran etika bernegara, Ibnu Khaldun sangat berpatokan kepada perilaku kehidupan Nabi Muhammad Saw. yaitu sebagai Nabi dan Rasul serta selaku kepala pemerintahan dan kepala negara beliau tegas dalam memburu dekadensi moral, tetapi dalam menghadapi yatim piatu dan orang tua jompo, beliau sangat berbelas kasih, karena Nabi itu sendiri diutus untuk menyempurnakan budi pekerti, termasuk dalam etika bernegara.⁷

6. Taqiyuddin An Nabani

Taqiyuddin An Nabani adalah pendiri Hizbut Tahrir, yang mengkomandokan seluruh anggota partainya untuk tidak berkenan ikut pemilihan umum di negara manapun kecuali pemilihan umum untuk pemilihan khalifah atau legislatif yang bersendikan syariat Islam, keberadaan negara republik dan negara kerajaan bukanlah tujuan mereka karena bertentangan dengan syariat Islam.

Negara Islam yang mereka dambakan adalah sistem kekhalifahan yang mengatur dunia dan akhirat tanpa terpisah sehingga pemimpin beragama sekaligus menjadi pemimpin pemerintahan sebagaimana layaknya kekhalifahan mulai dari Khalifah Khulafa Al Rasyidin sesudah Rasulullah Saw. ,kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah sampai pada kekhalifahan Ottoman yang terakhir dibubarkan oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki pada tahun 1924. Tetapi bukan berarti kekhalifahan akan lahir kembali di Turki, negara manapun boleh mempelopori dan setelah memenuhi syarat syariat Islam, mereka akan membaiaat pemimpinnya.

Untuk itu mereka mencoba mneghubungi Syiah yang sudah lebih dulu mendirikan negeri Islam Syiah di Iran di bawah komando Imam Ayatullah Rohullah Khomeini. Namun terdapat perbedaan prinsip karena Syiah menginginkan turunan Nabi Muhammad Saw yang memimpin atau menunggu sampai Imam yang Ghaib itu

⁷⁷ Inu Kencana Syafii, *op. Cit.*, hlm. 98.

datang. Selain itu Taqiyyudin An Nabbani juga pernah mengontak Imam Hasan Al Banna tetapi gagal dalam menyamakan prinsip politik.

7. Hasan Al Banna

Pada tahun 1906 Imam Al Banna lahir di kota Mahmudiyah dekat Iskandariyah. Beliau cukup lama tinggal di Ismailiyah, sehingga disinilah beliau untuk pertama kali mendirikan kantor Ikhwanul Muslimin, dari tempat inilah Ikhwanul Muslimin menyebar ke kota kairo bahkan seluruh negeri Mesir. Bagi Ikhwanul Muslimin, partai politik apapun dapat berdiri dengan nuansa budaya daerah dan negara masing-masing, namun di sisi lain harus berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadits.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Baik secara normatif (berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah) maupun secara historis (praktik kehidupan dalam sejarah) Islam memiliki perhatian yang besar terhadap masalah politik. Perhatian ini ditujukan dalam rangka menciptakan keadaan masyarakat yang aman, tertib, damai, harmonis, dan sejahtera lahir dan batin. Kehidupan politik sejak para khulafaur rasyidin yang empat terutama khalifah yang ke tiga dan keempat memberikan pengaruh terhadap perbedaan yang kuat dalam masalah teologi Islam.

Di dalam Islam terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan masalah politik antara lain kata-kata pemimpin, pelindung, penguasa, pemegang kekuasaan, pemimpin keagamaan, dan pemimpin dalam arti luas. Adanya berbagai istilah tersebut menunjukkan, bahwa Islam menetapkan sebuah bentuk struktur atau sistem politik tertentu untuk digunakan oleh seluruh dunia, melainkan menganut paham yang lebih fleksibel, akomodatif, dan sesuai keadaan masyarakat. Islam lebih mementingkan moral, etika dan spiritual politik. Fakta sejarah, membuktikan dengan jelas bahwa Islam tidak menganut sistem ketatanegaraan tertentu. Islam sama sekali tidak mempersoalkan bentuk atau sistem ketatanegaraan tersebut. Hal yang demikian ditempuh karena jika Islam menetapkan sistem ketatanegaraan tertentu, dan sistem tersebut tidak cocok bagi masyarakat Islam di suatu negara tertentu, maka berarti Islam telah mempersulit umatnya. Keadaan ini tidak ditempuh oleh Islam, karena tidak sejalan dengan prinsip Islam yang fleksibel, sesuai dengan zaman dan tempat, tidak menyusahkan orang dan seterusnya sebagaimana telah tampak jelas dalam karakteristik ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Cetakan I. Bandung: Mizan.
- Nata , Abudin. 2011. *Metodologi Studi Islam*. Edisi Revisi Cetakan ke 18. Jakarta: Rajawali.
-, 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Edisi I Cetakan I. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Cetakan I. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- http://stitattaqwa.blogspot.com/2013/01/pendekatan-studi-islam_24.html